

BAB I

PENDAHULUAN

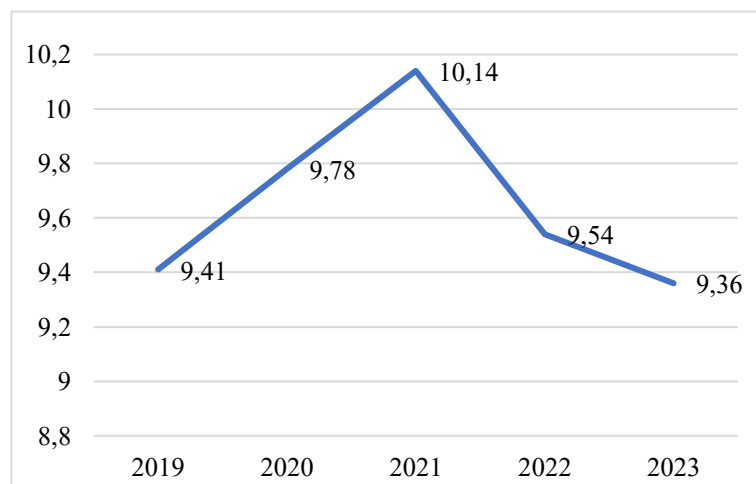
1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan salah satu indikator yang seringkali dihadapi oleh berbagai negara, khususnya di negara-negara berkembang. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan (Ferezegia, 2018).

Kemiskinan muncul pada saat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Menurut Todaro & Smith dalam bukunya yang berjudul “*Economic Development 11th Edition*” penduduk miskin adalah penduduk yang hidup dalam keadaan kurang nutrisi dan kesehatan yang buruk, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, hidup di wilayah-wilayah yang memiliki lingkungan buruk, dan memperoleh penghasilan yang rendah (Aini & Nugroho, 2023).

Masalah kemiskinan ini menjadi suatu perhatian bagi pemerintah di negara manapun salah satunya di negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang harus berupaya ekstra dalam pengentasan tingginya tingkat kemiskinan, terutama dalam masyarakat yang masih jauh dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan di Indonesia sangatlah serius yang dimana target pemerintah dalam penurunan angka kemiskinan belum tercapai.

Hal ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah dalam menurunkan masalah kemiskinan sangatlah serius. Meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih hidup dalam kondisi serba kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun akses terhadap layanan dasar. Hal ini menjadi suatu evaluasi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dan program harus mensejahterakan masyarakat. Berikut data tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2019-2023:



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan di Indonesia 2019-2023 (Persen)

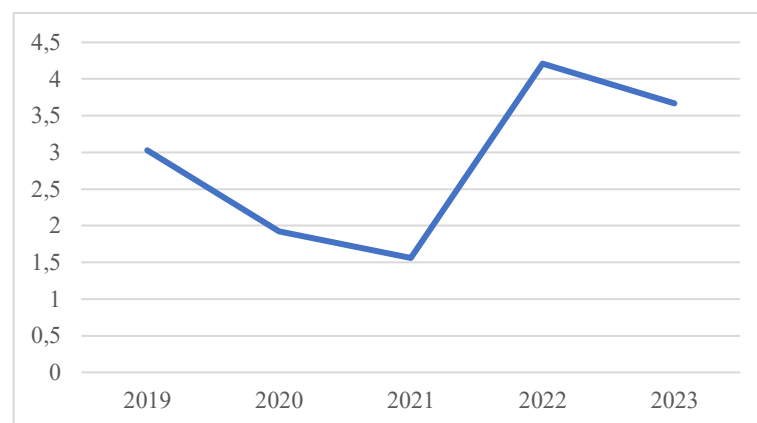
Berdasarkan gambar 1.1 yang ditampilkan, grafik menunjukkan fluktuasi tingkat kemiskinan dengan tren menurun selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2019 hingga 2021 terjadi peningkatan tingkat kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini sangat mungkin disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Pembatasan aktivitas ekonomi, krisis ekonomi global, penurunan permintaan global, dan penyusutan sumber daya alam serta lapangan

kerja yang tidak didukung dengan kualitas sumber daya manusia secara signifikan mempengaruhi perilaku kebutuhan masyarakat, sehingga mengakibatkan kemiskinan meningkat secara signifikan. Pada tahun 2022-2023 terlihat adanya tanda pemulihan. Tingkat kemiskinan mulai menurun kembali, pemulihan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional setelah dampak pandemi. menandakan bahwa kemiskinan di Indonesia telah berangsur-angsur menurun dari dampak pandemi.

Peningkatan ini mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pemulihan ekonomi global, kebijakan bantuan sosial, peningkatan sektor pertanian dan ekspor, dan akses layanan terhadap kesehatan dan pendidikan jauh lebih baik. Akan tetapi penurunan ini belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, pemerintah Indonesia menargetkan tingkat kemiskinan nasional berada pada kisaran 6–7 %. Namun, pada data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tingkat kemiskinan nasional masih sebesar 9,36 %, yang dimana target tersebut belum tercapai sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan telah menurunkan angka kemiskinan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi laju penurunannya belum cukup signifikan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Masalah kemiskinan ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya diantaranya inflasi.

Menurut Mankiw dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ekonomi Makro”, inflasi ialah kenaikan tingkat harga secara keseluruhan (Naomi et al., 2022). Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Inflasi memiliki dampak positif maupun negatif dalam perekonomian. Apabila perekonomian suatu negara mengalami suatu kelesuan maka Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter yang ekspansif (Ningsih & Andiny, 2018). Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus, sehingga berakibat pada makin tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Berikut gambar yang menunjukkan tingkat inflasi di Indonesia tahun 2019-2023:



Sumber: *World Bank* (data diolah)

Gambar 1.2 Tingkat Inflasi Indonesia Tahun 2019-2023 (Persen)

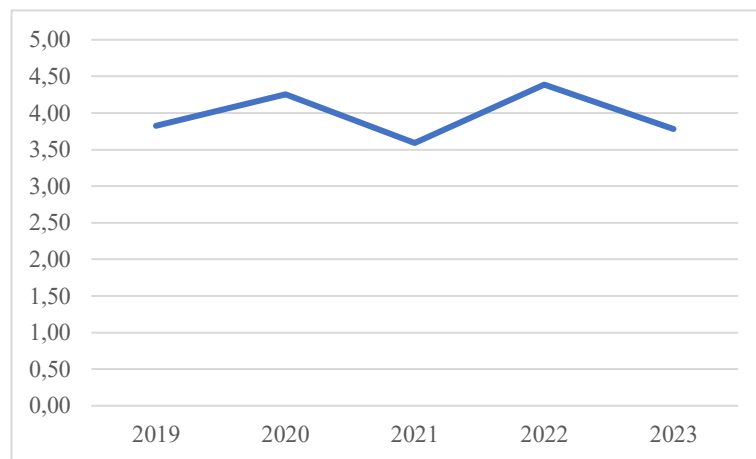
Gambar 1.2 menunjukkan tren inflasi di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023 yang mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2019 hingga 2021 terjadi penurunan yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan adanya penurunan permintaan domestik, pembatasan

aktivitas ekonomi, dan pembatasan perjalanan yang mengakibatkan konsumsi masyarakat menurun, sehingga menurunkan tekanan inflasi. Pada tahun 2022 hingga 2023 terjadi lonjakan yang begitu signifikan. Hal ini mengindikasikan terjadinya lonjakan harga energi global, lonjakan harga pangan, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi yang menyebabkan peningkatan permintaan domestik, sehingga berpotensi menaikkan harga barang dan jasa, terutama barang yang tergantung pada impor serta peningkatan daya beli masyarakat. Disamping inflasi, terdapat faktor lainnya yang diduga mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan yaitu salah satunya pengangguran.

Pengangguran juga sangat berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan di Indonesia. Pengangguran yang tinggi akan mengurangi pendapatan masyarakat dan berdampak pada menurunnya tingkat kemakmuran masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin turunnya tingkat kemakmuran maka akan menimbulkan masalah yaitu kemiskinan.

Menurut Sukirno dalam bukunya yang berjudul “Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga” pengangguran merupakan suatu masalah yang sering melanda kegiatan perekonomian suatu negara (Muslim, 2014). Angka pengangguran yang tinggi yakni menjadi persoalan bagi suatu perekonomian. Apabila tingkat pengangguran tinggi maka akan memicu kemiskinan meningkat. Salah satu sebab kemiskinan yaitu kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar, hal ini berkaitan juga dengan keterbatasan lapangan pekerjaan yang menyebabkan masyarakat kurang dalam mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Untuk mengatasi kemiskinan, perlu adanya peluasan lapangan kerja bagi mereka yang pengangguran. Perluasan lapangan pekerjaan sangat penting dikarenakan untuk mengurangi tingkat pengangguran (Pratama & Anis, 2022). Berikut gambar yang menunjukkan tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2019 – 2023:



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1. 3 Tingkat Pengangguran Indonesia Tahun 2019-2023 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.3 menunjukkan tren tingkat pengangguran Indonesia dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 hingga 2020 terjadi kenaikan tingkat pengangguran. Kenaikan ini dipengaruhi adanya dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu hampir seluruh sektor ekonomi, Adanya pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai sektor dan perekonomian Indonesia. Pandemi juga mengganggu rantai pasokan global dan domestik, yang berimbas pada banyak industri manufaktur, sehingga lapangan pekerjaan di sektor tersebut juga terpengaruh.

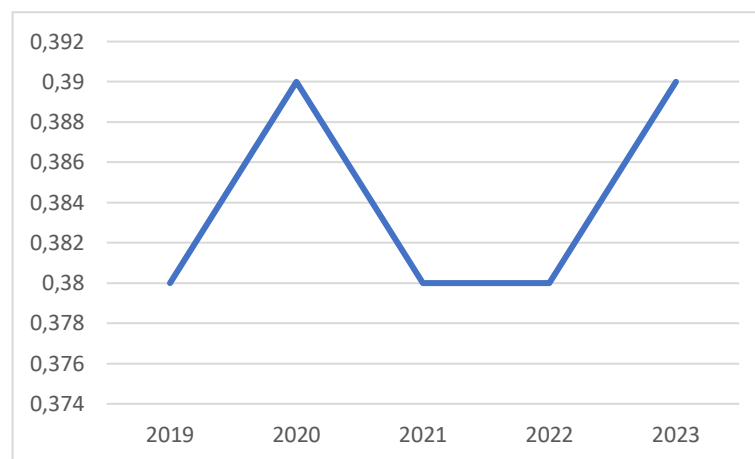
Pada tahun 2021 hingga 2023 tingkat pengangguran mengalami fluktuasi, hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang dimana sangat berpengaruh untuk menurunkan angka tingkat pengangguran. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti, pembangunan infrastruktur, ketidakstabilan ekonomi global, investasi asing, lonjakan harga energi dan inflasi, serta proses pemulihan ekonomi yang belum merata di berbagai sektor dan daerah

Pemerintah Indonesia menargetkan pengangguran berada pada kisaran 5% hingga 5,5% pada akhir periode RPJMN 2020-2024. Pada tahun 2023, Indonesia hampir mencapai target pengangguran, dengan angka pengangguran sekitar 5,3%. Meskipun mendekati target, masih ada tantangan dalam mencapai angka pengangguran yang lebih rendah. Selain pengangguran terdapat beberapa faktor yang berhubungan dan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat kemiskinan seperti, ketimpangan pendapatan.

Permasalahan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, ini dibuktikan dengan tingginya disparitas pendapatan antar daerah (Baiq, 2012). Menurut penelitian dari Febriaty, (2020) mengungkapkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan optimal dan akan terhambat oleh ketidakmerataan pendapatan.

Ketidakmerataan distribusi pendapatan tersebut juga akan memberikan dampak instabilitas sosial sehingga memicu terjadinya ketimpangan pendapatan, hal tersebut akan menjadi awal munculnya kemiskinan apabila dibiarkan berlarut-larut. Besarnya ketimpangan pendapatan yang terjadi maka semakin besar pula

variasi dalam distribusi pendapatan yang akan menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan (Damanik et al., 2018). Berikut gambar yang menunjukkan ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2019-2023:



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

**Gambar 1. 4 Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2019-2023
(Persen)**

Berdasarkan gambar 1.4 menunjukkan perkembangan ketimpangan pendapatan pada tahun 2019 hingga 2023 berdasarkan data dari *Badan Pusat Statistik (BPS)*. Pada tahun 2019 hingga 2020 terjadi peningkatan yang tidak begitu signifikan dikarenakan pada tahun tersebut sedang terjadi wabah pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh seluruh negara di dunia. Adanya wabah ini tentunya berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, hal ini dikarenakan banyak para pekerja yang kehilangan pekerjaannya akibat wabah tersebut sehingga mengurangi penghasilan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Pada tahun 2021 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya hal ini dikarenakan pemulihan pasca pandemi COVID-19 dan juga didukung dengan adanya kebijakan pemerintah yang mampu mengurangi adanya ketimpangan pendapatan. Terjadi

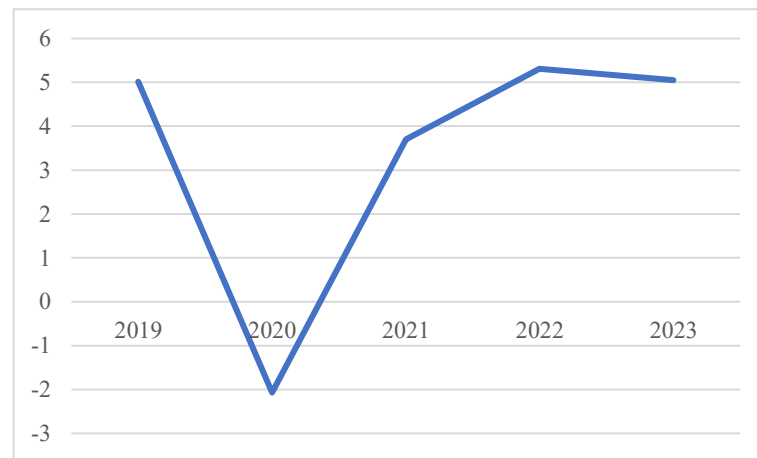
peningkatan pada tahun 2023 yang dimana hal ini dikarenakan adanya fluktuasi ekonomi pasca pandemi, ketidakmerataan pertumbuhan di perkotaan dan pedesaan.

Pemerintah Indonesia memiliki target mengenai ketimpangan pendapatan, yang diukur melalui rasio gini, dalam nota keuangan RAPBN tahun 2024 ditetapkan berada di kisaran 0,374 hingga 0,377. Target ini mencerminkan upaya dari pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan intra dan antar negara guna mampu mengentaskan kemiskinan. Selain ketimpangan pendapatan terdapat juga faktor lain yang berpengaruh terhadap kemiskinan diantaranya pertumbuhan ekonomi.

Secara teori, usaha untuk mengentas segala bentuk kemiskinan yaitu dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang bisa diciptakan dalam sektor ekonomi seperti adanya perluasan kebijakan kesempatan untuk bekerja. Menurut (Siregar & Wahyuniarti, 2023), pertumbuhan ekonomi memang merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) untuk mengurangi kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi tingkat kemiskinan disuatu wilayah, mengingat jumlah penduduk yang selalu bertambah maka kebutuhan ekonomi pun juga akan ikut bertambah. Oleh karena itu dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun yang diperoleh dari produk domestik regional bruto. Selain itu pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran adanya perkembangan ekonomi untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih baik. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang

apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari masa sebelumnya. Secara umum, pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan peningkatan kapasitas produksi nasional dan daya beli masyarakat, yang diharapkan dapat berdampak langsung terhadap pengurangan angka kemiskinan. Namun, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan tidak selalu linier, mengingat distribusi hasil pembangunan tidak selalu merata. Berikut gambar yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2019-2023:



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

**Gambar 1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2019-2023
(Persen)**

Berdasarkan gambar 1.5 menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 2019 hingga 2023 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,02%. Namun, akibat dampak pandemi COVID-19, angka ini menurun drastis menjadi -2,07% pada tahun 2020. Meskipun demikian, Indonesia mampu bangkit secara bertahap dengan pertumbuhan sebesar 3,7% pada tahun 2021, kemudian

meningkat menjadi 5,31% di tahun 2022, dan sedikit menurun menjadi 5,05% pada tahun 2023.

Meskipun terjadi pemulihan ekonomi, belum dapat dipastikan apakah pertumbuhan tersebut secara langsung berdampak pada penurunan angka kemiskinan, mengingat pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mendalam mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan guna memperoleh pemahaman empiris dan ilmiah yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian ini maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Melalui Tingkat Pengangguran Selama Periode 2005-2023”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang di dapat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2005-2023?
2. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2005-2023?

3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2005-2023?
4. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia melalui tingkat pengangguran tahun 2005-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2005-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan, terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2005-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia melalui tingkat pengangguran tahun 2005-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk mengetahui pengaruh keadaan inflasi, tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi

langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2005-2023 sebagai bahan informasi bagi peneliti lain.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian memberikan gambaran pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di masyarakat secara umum dan sebagai bukti pentingnya menjaga angka inflasi dan faktor ekonomi yang lainnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Indonesia melalui *website* resmi *World Bank* dan Badan Pusat Statistik periode 2005 sampai dengan 2023.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini akan dilaksanakan terhitung dari bulan Maret 2025 sampai dengan Juli 2025. Adapun jadwalnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

[illegible]